

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS PROGRAM KUBE-FM DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTAENG)

Munawir¹, Muhlis Madani², Fatmawati³, Hafiz Elfiansya Parawu⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Makassar

e-mail : munawir@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the KUBE-FM Program of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia at the Bantaeng Regency Social and Employment Office and at the same time analyze the inhibiting factors that influence it, using descriptive qualitative research type. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that from the size and objectives of the policy, the implementor understood the intent and purpose of the program. Regarding resources, quality implementors and budgets are still limited. From the aspect of the implementing agent characteristics are quite fulfilling. From the aspect of inter-organizational communication and strengthening activities it still needs to be improved, as well as the aspects of the implementor's disposition that have not met expectations. While aspects of the social, economic, and political environment must continue to be considered. Barriers to implementation in terms of content of policy are the interests of the target group, the position of decision makers, policy implementers, and the resources provided. Whereas in terms of context of implementation are the power, interests, and strategies of the actors involved, and the level of compliance and responsiveness of the target group.

Keywords: *Implementation of policies, poverty alleviation programs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program KUBE-FM Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng sekaligus menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhinya, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ukuran dan tujuan kebijakan, para implementor telah memahami maksud dan tujuan program. Terkait sumberdaya, implementor yang berkualitas dan anggaran masih terbatas. Dari aspek karakteristik agen pelaksana cukup memenuhi. Dari aspek komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas masih perlu ditingkatkan, begitu pula dari aspek disposisi implementor terlihat belum memenuhi harapan. Sedangkan dari aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masih harus terus diperhatikan. Hambatan implementasi dari *sisi content of policy* adalah kepentingan kelompok sasaran, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang disediakan. Sedangkan dari *sisi context of implementation* adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, program pengentasan kemiskinan*

1. PENDAHULUAN

Respon pemerintah terhadap masalah kemiskinan dijabarkan melalui program-program beberapa Kementerian/ Lembaga Negara. Hal ini dilakukan untuk target menurunkan jumlah penduduk miskin dari 10,96% (September Tahun 2014) hingga menjadi sekitar 7 sampai 8 persen pada akhir

pembangunan jangka menengah tahap III, pada tahun 2019 (Buku I (RPJMN 2015-2019). Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas diketahui bahwa sampai dengan Maret 2014, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11,25% dari total 29.13 juta jiwa yang ada di Indonesia dibanding 3 tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 persentase jumlah penduduk miskin yaitu 12,49% dan

tahun 2012 turun menjadi 11,66% serta turun lagi di tahun 2013 sebesar 11,47%.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2011 mencapai 832,9 ribu (10,29%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang berjumlah 825,79 ribu (10,11%), berarti jumlah penduduk miskin turun sekitar 7,1 ribu orang. Selama periode Maret 2011 - 2012, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 0,7 ribu orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 7,8 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2012, sebagian besar (84,35 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Jumlah tersebut, sebenarnya masih relatif tinggi namun Provinsi Sulawesi Selatan tidak masuk 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Indonesia yang cenderung mengalami penurunan berdasarkan hasil survey BPS sejak tahun 2011 sampai Maret 2014, Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sedikit mengalami kenaikan angka kemiskinan dalam rentan tahun 2011 sampai periode Maret 2014. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin, yaitu 10,29 % periode Maret 2011 kemudian turun menjadi 10,11 % pada periode Maret 2012, turun lagi menjadi 9,54 % di periode Maret 2013 dan akhirnya naik menjadi 10,28 % pada periode Maret 2014.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng sangat signifikan dimana tahun 2014 jumlah penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 8.432 163 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng berjumlah 182.283 jiwa, yang berarti sekitar 2 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan. Kemudian untuk laju pertumbuhan PDRB untuk tahun 2014 Kabupaten Bantaeng berada di atas laju pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan PDRB Bantaeng sudah signifikan dalam laju pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Bantaeng mencapai 27,08 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 13.02 persen. Pada tahun 2011 dan berturut-turut sampai tahun 2013 sebesar 18,18 persen, 21,28 persen, dan 23,96 persen. Angka-angka ini

mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berdaya mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu daerah yang menerima bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) sejak tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Selatan. Total anggaran yang diterima Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng sebagai implementor KUBE-FM sebesar Rp. 2.240.000.000,-, dengan jumlah kelompok sebanyak 112, yang tersebar di desa atau kelurahan di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Setiap Desa, atau Kelurahan penerima KUBE-FM di beri kuota sebanyak 8 (delapan) kelompok untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama dan setiap kelompok berjumlah sepuluh orang yang setiap kelompok menerima anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-, bila dirata-ratakan per anggota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-.

Problematisasi pengentasan percepatan kemiskinan dalam bentuk KUBE-FM di Kelurahan Bonto Sungguh Kecamatan Bisappu, Desa Lakbo Kecamatan Tompo Bulu, Desa Baruga Kecamatan Pajukukung Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil pengamatan peneliti, diantaranya ketiadaan fasilitas pendamping berupa alokasi anggaran operasional untuk memonitor dampingan kelompoknya, kemudian menjadi penyebab tidak berjalannya pelatihan kelompok dalam pengembangan sumber daya manusia, ini terlihat peran-peran individu sebagai anggota tidak mampu memainkan peran-peran kelompok. Indikator sederhana pada hal-hal teknis seperti rapat-rapat kelompok tidak berjalan serta pembukuan hasil penjualan dan penyeteroran dalam sebuah kelompok tidak terbukukan secara baik sehingga sulit mengukur sejauh mana perkembangan kelompok tersebut dalam segi pendapatan.

Keterbatasan implementor dalam bekerja mendampingi kelompok sasaran berdasarkan hasil pengamatan di lapangan tiap kelurahan dan desa penerima KUBE yang berjumlah 8 (delapan) kelompok dan setiap kelompok beranggotakan sepuluh orang hanya didampingi satu orang sebagai pendamping. Ketidacukupan fasilitas dalam implementor dalam hal ini dana yang cukup sangat

mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan Ripley dan Franklin (Winarno, 2014: 148-149) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas semua uang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Program KUBE-FM Kemensos RI pada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng sekaligus menganalisis faktor-faktor penghambat yang memengaruhinya.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Secara sederhana, Agustino (2008) dan Dye (2005), mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan; *public policy is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik seperti Woll, Chandler, dan Plano (Tangkilisan, 2003: 1-2).

Chandler dan Plano, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pendapat ini juga bersinggungan dengan pandangan Woll bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai

lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Mengamati beragam pendapat yang diutarakan oleh para ahli mengenai definisi kebijakan publik, memberikan gambaran bahwa para ahli hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah). Tetapi, berbicara tentang kebijakan tidak selalu merupakan apa yang diinginkan oleh pemerintah saja, secara umumnya masyarakat juga memiliki apa yang diinginkan untuk dilakukan, selalu ada alasan dan cara untuk bertindak. Sehingga, berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Meter dan Horn (1975), memberikan pernyataan bahwa, "*Policy implementations encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set in prior policy decisions*". Pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Ada beberapa teori model implementasi kebijakan publik diantaranya, Model Ripley dan Franklin, Meter dan Horn, dan Hogwood dan Gunn.

a. Model Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin (Alfatih, 2010: 52), ada 3 (tiga) perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (a) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; (b) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi; dan (c)

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Pendapat Ripley dan Franklin menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

b. Model Meter dan Horn

6 (enam) variabel menurut Meter dan Horn (Wahab, 2006), yang memengaruhi kinerja kebijakan, yaitu: (a) Ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumberdaya; (c) Karakteristik agen pelaksana; (d) Sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; (e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

c. Model Hogwood dan Gunn

Model ini sering disebut oleh para ahli "*the down approach*". Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 2006: 57-64), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu, adalah: (a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; (b) Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; (c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; (d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal; (e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya; (f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil; (g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; (h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan (j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang/ kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Konsep Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang

memasukkan aspek sosial dan moral (Sholeh, 2010). Dalam artian sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam artian luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional (Hamudy, 2008). Menurut Kurniawan (2004), kemiskinan apabila pendapatan suatu komunitas berada ditingkat bawah suatu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat layak.

Pada konferensi PBB terkait pengembangan Sosial Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi yang ditandai oleh kehilangan kebutuhan dasar manusia termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi (Anonymaus, 2006). Menurut Suparian (1995), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tanpa pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - 1993), menjelaskan kemiskinana adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada pada dirinya.

Konsep KUBE-FM (Kelompok Usaha Bersama – Fakir Miskin)

KUBE-FM merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas ekonomi keluarga masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui kelompok ini mereka dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan oleh anggota KUBE-FM. Pendekatan KUBE-

FM didasari oleh kedekatan tempat tinggal jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam / keadaan geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, memiliki motivasi yang sama. Selain itu harus diperhatikan juga keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama.

Tujuan KUBE-FM, adalah: (a) Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan social warga miskin dan masyarakat dalam penanganan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial; (b) Meningkatkan pendapatan anggota KUBE-FM; (c) Mewujudkan kemandirian usaha social ekonomi anggota KUBE-FM; (d) Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan utama, fasilitas social public dan sistem jaminan kesejahteraan sosial; (e) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan kemiskinan; dan (f) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan masalah kemiskinan.

Adapun indikator keberhasilan KUBE-FM, adalah: (a) Meningkatnya pendapatan keluarga miskin; (b) Meningkatkan kemandirian usaha sosial – ekonomi keluarga miskin; (c) Meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik; (d) Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial KUBE-FM di dalam masyarakat; dan (e) Meningkatkan ketahanan sosial didalam anggota KUBE-FM dalam mencegah masalah-masalah sosial dan kemiskinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Penelitian ini berlokasi di 2 (dua) tempat, yaitu Kantor Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng karena Dinas Sosial merupakan pelaksana dan penanggung jawab program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kabupaten Bantaeng, dan Lokasi usaha penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman, yakni, (1) Mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan; (2) Data reduksi

adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, artinya mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya; (c) Data display atau menyajikan data, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami; dan (d) Data kesimpulan langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program KUBE-FM sebagai Bentuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

Guna menganalisis implementasi kebijakan Program KUBE-FM yang diharapkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng, peneliti membatasi pada 3 (tiga) desa/ kelurahan pada 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Desa Bontosunggu Kecamatan Bisappu, Desa Tompobulu Kecamatan La'bo, dan Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang. Peneliti menggunakan teori dari Meter dan Horn (1975) mengenai model implementasi kebijakan publik sebagai indikator dalam menganalisis implementasi kebijakan Program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari 6 (enam) variabel, yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan kebijakan program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng, maka hal pertama perlu memperhatikan apakah para implementator program KUBE-FM dan *stakeholders* terkait telah memahami dan menjalankan maksud, tujuan, tugas serta fungsinya sebagaimana yang telah tertuang dalam aturan. Kedua, apakah tujuan dari program KUBE-FM sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng telah dilaksanakan (implementasi) dengan baik atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa para implementor Program KUBE-FM memahami bahwa program ini merupakan program strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan, dikarenakan

memberikan bantuan modal usaha secara tunai langsung kepada masyarakat miskin agar dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomi. Secara teknis standar dan tujuan pembentukan Kelompok Usaha Bersama cukup memudahkan penyelenggara untuk memahaminya, karena dibekali buku pedoman panduan teknis dari Kementerian Sosial tentang bagaimana pola rekrutmen, baik itu pendamping kelompok dan kelompok sasaran (fakir miskin), serta bagaimana menjalankan program ini.

Dalam pelaksanaan program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng, semua KUBE-FM yang terbentuk telah berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan pelopor pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Dimana sebelum membentuk KUBE-FM terlebih dahulu merumuskan tujuan bersama kemudian tiap anggota yang tergabung wajib mengetahui tujuannya sebagai dasar langkah dalam merencanakan visi dan misi.

Pembentukan KUBE-FM telah didasari oleh tujuan yang jelas yang bersinergi dengan visi pemerintah daerah dalam upaya penanganan kemiskinan. Konsep umum tujuan KUBE-FM yang disampaikan oleh kementerian Sosial, yang kemudian disampaikan kembali oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantaeng, yaitu: peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE-FM secara bersama dalam kelompok; peningkatan pendapatan; pengembangan usaha; dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE-FM dan dengan masyarakat sekitar.

Jika program KUBE-FM diimplementasikan dengan baik maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat mewujudkan misinya yaitu meredam angka kemiskinan. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng yang dimotori oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng telah memahami maksud dan tujuan program tersebut. Program KUBE-FM adalah unsur penting untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tentang kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia terutama di Kabupaten Bantaeng. Maka, pada saat

pembentukan dan perumusan konsep KUBE-FM perlu memperhatikan hal berikut, berdasarkan hasil analisis peneliti, pembentukan KUBE-FM haruslah memiliki sasaran dan tujuan yang jelas.

b. Sumberdaya

Sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng yaitu Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial) yang merupakan inisiator juga implementor kebijakan program; Pendamping KUBE-FM; dan Pelaku Usaha yang tergabung dalam Kelompok KUBE-FM. Mereka adalah penentu keberhasilan implementasi program. Maka kuantitas dan kualitas merupakan tuntutan yang perlu dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa implementasi Program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng berjalan dengan lambat. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Bantaeng menyatakan telah mengutus SDM berkualitas untuk mengelola program KUBE-FM, tetapi realitanya kualitas SDM lah penyebab implementasi KUBE-FM tidak dalam kategori ideal.

Fasilitator yang telah diberi delegasi tugas dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantaeng tentu bukan sekedar pengarahan saja yang diberikan kepada para pendamping. Sangat perlu turut hadir dan andil dalam memberikan *training of trainer* kepada para pendamping, karena kegiatan pelatihanlah yang sebenarnya dibutuhkan secara prakteknya dilapangan. Salah satu penyebab tidak optimalnya implementasi program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng karena kualitas SDM baik pendamping hingga anggota KUBE-FM yang kurang kreatif dan terampil dalam mengelola sumber daya dan manajemen usaha. Tidak adanya pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantaeng kepada para pendamping KUBE-FM, memberi dampak minimnya ide dan kreatifitas dalam tugas memberdayakan anggota KUBE-FM yang didampinginya.

Adapun terkait sumber daya anggaran, terungkap bahwa pelaksanaan Program KUBE-FM sebagai program pengentasan kemiskinan mendapat dukungan anggaran yang menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan, dimana anggaran yang langsung diberikan kepada kelompok usaha fakir miskin dari kementerian secara tunai lewat transfer kerekening kelompok masing masing dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, anggaran tersebut merupakan anggaran stimultan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

Anggaran yang diberikan hanyalah merupakan anggaran stimulus, yang berarti anggaran tersebut sangat terbatas, menandakan ketidakkeseriusan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui Program KUBE-FM. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan dan keluhan para pendamping Program KUBE-FM sebagai implementor kebijakan program.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng telah berupaya memenuhi faktor penting pendukung implementasi kebijakan dalam pentuan agen pelaksana yang didasarkan pada ciri yang tepat serta cocok dalam menjalankan Program KUBE-FM karena agen yang dimandatkan yaitu mereka yang telah akrab dengan lingkungan sosial budaya masyarakat dimana Program KUBE-FM itu dibentuk.

Persoalan kemudian Dinas Sosial alpa dalam melihat luas cakupan wilayah kebijakan dalam menentukan berapa jumlah personil agen pelaksana yang perlu disediakan sebagai pendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Cakupan luas wilayah kerja kebijakan dan beban kerja kebijakan menjadi hal yang penting dalam penentuan jumlah personil sebagai agen pelaksana sebuah kebijakan agar berjalan dengan baik ketika tahap proses implementasi.

d. Komunikasi Antarorganisasi dan Penguatan Aktivitas

Sebagai agen pelaksana dalam implementasi kebijakan Program KUBE FM di Kabupaten Bantaeng, maka seharusnya

semua jajaran baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Bantaeng serta para tenaga pendamping yang diutus ini memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan tugas dan mencapai visi bersama yaitu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

Kunci dari terbinanya komitmen para agen pelaksana KUBE-FM di Kab. Bantaeng adalah adanya kegiatan koordinasi dan konsultasi antar instansi secara vertikal yang terjalin dengan baik, agar proses implementasi terlaksana sesuai harapan. Tetapi, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menemukan beberapa realita yang berbeda dengan konsep KUBE-FM yang telah dirancang oleh Kementerian Sosial. Masalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antargagen pelaksana menjadikan implementasi Program KUBE-FM ini tidak sesuai ekspektasi.

Salah seorang pendamping KUBE-FM mengeluhkan kurangnya pembekalan materi teknis yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantaeng melalui kegiatan pelatihan atau bimtek. Tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantaeng dalam program KUBE-FM, selain sekedar perpanjangan tangan berdampak pada kualitas pengawalannya.

e. Disposisi Implementor

Pada tahap pengimplementasian kebijakan Program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng ditemukan ketidakseriusan para implementator karena aktifas Kelompok Usaha Bersama tidak berjalan, aktifas yang dimaksud adalah rapat rapat kelompok, iuran kelompok dimaksudkan untuk kelangsungan dan keberlanjutan dalam mengembangkan Kelompok Usaha Fakir Miskin. Pertemuan bersama anggota kelompok hanya pada proses pembentukan kelompok sampai pada penerimaan modal bantuan, setelah itu jarang melakukan pertemuan lagi.

Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa ketidakcukupan personil dan fasilitas yang memadai sebagai hal yang diinginkan oleh para implementator menjadi kendala dalam pelaksanaan Program KUBE-FM. Rasio pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kakulasi ketersediaan personil dan insentif akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya sebuah kebijakan, hal paling penting adalah ketersediaan anggaran (uang) menjadi faktor penting ketika hal hal pendukung lain terpenuhi.

f. Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hasil penelitian ini menemukan dampak sosial dari implementasi program KUBE-FM, diantaranya yaitu :

- 1) Adanya interaksi kelompok yang difasilitasi oleh pertemuan rutin setiap bulan

Pada awal pembentukan KUBE-FM di Desa Baruga, Desa Labbo dan Kelurahan Bonto Sunggu di Kabupaten Bantaeng. KUBE-FM di Kelurahan Bonto Sunggu merupakan KUBE yang hampir rutin setiap bulan melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Pendamping KUBE-FM. Tetapi ini hanya aktif selama kurang dari 2 tahun. Meskipun pertemuan rutin yang telah direncanakan belum konsisten sampai saat ini, tapi dari pengamatan peneliti di lapangan masih melihat interaksi sosial antar sesama anggota dan pendamping.

- 2) KUBE-FM meningkatkan ikatan kekeluargaan dan rasa kepedulian para anggotanya

Pemberdayaan masyarakat dalam KUBE-FM masih berada pada tingkat manipulasi dimana masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program tersebut. Walaupun demikian program KUBE-FM dapat meningkatkan ikatan kekeluargaan dan rasa kepedulian antar anggotanya.

Dampak ekonomi dari implementasi Program KUBE-FM yang ditemukan tidak berjalan secara efektif, berdasarkan hasil penelitian, produktifitas kelompok sasaran yang dikelompokkan dalam usaha bersama fakir miskin, pendapatan mereka tidak terlalu signifikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan secara ekonomi dalam rangka menata kehidupan lebih baik, bantuan dalam bentuk

tunai sebatas dirasakan mempermudah dalam merintis usaha semata sebagaimana hasil wawacana kepada kelompok sasaran. Hal ini berarti apa yang menjadi tujuan dari program kelompok usahar fakir miskin terjadinya aktivitas ekonomi fakir miskin yang produktif dalam menjalankan usaha kelompok sebagai upaya secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan program KUBE juga dimaksudkan sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan ssebagaimana yang telah tertuang dalam nomenklatur Kementerian Sosial Republik Indonesia, kurang memberikan efek pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.

Sedangkan di sisi politik, hingga saat ini kebijakan Program KUBE-FM yang menjadi acuan masih menggunakan kebijakan nasional. Pemangku kebijakan dalam hal ini DPRD dan pemerintah daerah belum mengeluarkan regulasi turutan sebagai bentuk kepedulian dalam pengembangan manajemen KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kabupaten Bantaeng.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan Program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng, adalah:

- a. Ketidakcukupan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran

Terkait sumber daya manusia dalam konsep implementasi menyangkut kuantitas dan kualitas agar efektif bekerja menjalankan kebijakan Program KUBE-FM ketiadaan *training of trainer* kepada para pendamping merupakan komponen penting sebagai implementator, kegiatan pelatihanlah yang sebenarnya dibutuhkan secara praktek di lapangan menjadi penyebab tidak optimalnya implementasi program KUBE-FM di Kabupaten Bantaeng karena kualitas SDM Pendamping yang kurang kreatif dan terampil mengelola kelompok dampingannya sehingga apa yang menjadi gagasan konsep program ini sebagai program pengentasan kemiskinan di

Kementerian Sosial RI tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terkait sumber daya anggaran, anggaran yang disediakan oleh Kementerian Sosial RI diperuntukan khusus fakir miskin, sedangkan alokasi anggaran insentif para pendamping Program KUBE-FM yang dimandatkan oleh Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng tidak mendapatkan fasilitas anggaran untuk melakukan proses pendampingan, sehingga proses monitoring program ini tidak berjalan maksimal.

- b. Hambatan lain yang dirasakan adalah terkait masalah pemasaran, karena kelompok anggota Program KUBE-FM sangat membutuhkan kerja sama dengan lembaga pemasaran yang dapat membela kepentingan mereka. Eksistensi usaha mereka masih dirasakan kurang bagi pelanggan yang menjadi konsumen mereka. Terkadang kondisi keuangan kelompok usaha ini membuat kondisi usaha naik turun. Hal ini membuat persaingan sangat ketat dengan usaha sejenis.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

- a. Implementasi kebijakan Program KUBE-FM ditinjau dari ukuran dan tujuan kebijakan, para implementor telah memahami maksud dan tujuan dari program ini. Terkait sumberdaya, implementor yang berkualitas dan anggaran masih terbatas. Dari aspek karakteristik agen pelaksana cukup memenuhi. Dari aspek komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas masih perlu ditingkatkan, begitu pula dari aspek disposisi implementor terlihat belum memenuhi harapan. Sedangkan dari aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masih harus terus dipertimbangkan.
- b. Hambatan implementasi dari *sisi content of policy* adalah kepentingan kelompok sasaran, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang disediakan. Sedangkan dari *sisi context of implementation* adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

5. REFERENSI

- Ali, Faried Ali, dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan (Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintahan)*, Bandung: Aditama
- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making, Sixth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Khomsan, Ali dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan*. Yayasan Pustaka Obor: Indonesia
- Kurniawan, RC. 2004. *Poverty Pathology An Ironic Of A Country, Lampung: Department of Gorvermental Science – Faculty Of Social and Politics Sciences. University of Lampung*.
- Pertiwi Mutiara. 2008. *Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Program Pemberdayaan Rakyat Miskin Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Pesanggrahan)*
- Purwanto Agus Erwan. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisi Kebijakan Gajah Mada University Press*
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (2014). Buku I Agenda Pembangunan Nasional.
- Sitepu Anwar. 2015. *Analisis efektifitas kelompok usaha bersama sebagai instrumen program penanganan fakir miskin*.
- Soleh, M. 2010. *Menanggulangi . Kemiskinan Telaah dan Beberapa Strategi Penaggulangannya*.
- Wahab Abdul Solichin 2015. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Kepenyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan)* Bumi Aksara
- Winarno Budi 2014 *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)* PT Buku Seru.

